



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 10 September 2021

Halaman: 1

Revisi Penunjukan Objek Wisata!

BANTUL—Pemerintah Pusat diminta merevisi keputusan memilih objek wisata Watu Lumbung Culture Resort menjadi salah satu dari 20 objek wisata yang akan dibuka.

Jumali, Yosef Leon, & Abdul Hamid Razak
redaksi@harianjogja.com

- ▶ Komisi B DPRD Bantul meminta agar Pemerintah Pusat meninjau ulang penunjukan Watu Lumbung sebagai salah satu objek percontohan.
- ▶ Dispar DIY juga mengusulkan destinasi yang sudah memiliki sertifikat CHSE dari Kemenperkrif untuk uji coba.

Objek wisata yang berada di Padukuhan Kretek, Parangtritis, Kapanewon Kretek, Bantul, itu dinilai tidak layak dijadikan lokasi percontohan.

DPRD Kabupaten Bantul menemukan sejumlah catatan di objek wisata Watu Lumbung Culture Resort saat sidak ke lokasi wisata itu. "Harusnya Pemerintah Pusat turun ke lokasi dan melihat kondisinya sebelum memutuskan. Dari segi penerapan protokol kesehatan, keamanan, kebersihan, semua tidak ada di tempat ini," kata Ketua Komisi B DPRD Bantul, Wildan Nafis, saat sidak ke Watu Lumbung, Kamis (9/9).

Dari segi protokol kesehatan, Wildan menilai Watu Lumbung tidak ada tempat cuci tangan. Sedangkan dari segi kebersihan, objek wisata yang menawarkan edukasi hidup berdampingan dengan alam dan pembudidayaan madu ini sangat kotor dan tidak pernah dibersihkan.

► Halaman 11

AWAS CORONA!

Instansi	Tindak Lanjut
	☐ Untuk Ditangge
	☐ Untuk Diketa
	☐ Jumpa Pers

Kepala

Revisi Penunjukan...

"Kemudian, bangunan semi permanennya sangat membahayakan pengunjung. Banyak yang lapuk. Dan, tempat ini sama sekali tidak ada persiapan. Tidak ada penataan yang baik," ujar Wildan.

Berdasarkan temuan itu, Komisi B DPRD Bantul meminta agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan menunjuk Watu Lumbung sebagai salah satu objek percontohan. Masih banyak tempat wisata lain di Bantul yang telah memiliki sertifikat jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan CHSE atau *Cleanliness* (kebersihan), *Health* (kesehatan), *Safety* (keamanan), dan *Environment* (ramah lingkungan).

Terpenting, objek wisata lainnya yang layak itu bisa lebih memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan warga sekitar.

"Salah satu yang siap itu Pantai Parangtritis. Pelaku wisata sudah divaksin, dari segi CHSE sudah memenuhi, dan memberi kontribusi bagi PAD dan warga sekitar. Jadi, pemerintah jangan ambil keputusan sepihak, tanpa koordinasi dengan daerah," jelasnya.

Salah satu pengelola Watu Lumbung, Ari mengaku sengaja tidak banyak memperbaiki objek wisatanya. Ia mengakui objek yang dikelola bersama dengan Boy Rifai, pemilik Watu Lumbung, memang belum mengantongi sertifikat CHSE.

"Karena kami yakin yang berwisata ke sini semua sehat. Dulu setahun yang lalu, kami sempat menyiapkan gentong untuk cuci tangan, dan ada pengecekan suhu, tapi sekarang tidak perlu. Karena yang ke sini pasti sehat, karena berwisata berdampingan dengan alam," katanya.

Terkait dengan ditunjuknya Watu Lumbung menjadi salah satu dari 20 objek percontohan, Ari mempersilakan DPRD atau pemerintah daerah menanyakan ke Pemerintah Pusat. "Silakan tanya yang beri izin. Itu kewenangan dari Pusat. Kemarin kami memang sudah ikut *zoom* terkait dengan kesiapan untuk uji coba," jelasnya.

Surat Resmi

Dinas Pariwisata DIY mengaku belum

menerima surat resmi destinasi wisata di DIY yang boleh diuji coba saat PPKM Level 3.

Kepala Dispar DIY, Singih Raharjo, belum mendapatkan surat resmi tiga destinasi yang boleh uji coba. Meski begitu, ia mengapresiasi kebijakan dilakukannya uji coba operasional objek wisata. "Kami diberi kuota tiga destinasi. Tapi sampai hari ini [kemarin] kami belum menerima surat resmi yang tiga itu lokasinya mana saja? Kami masih menunggu," kata Singih.

Ia menjelaskan Dispar terus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan untuk membahas hal tersebut. Kuota tiga destinasi tersebut, kata Singih merupakan keputusan dari Pusat.

"Saya kira kami perlu tunggu saja surat resmi dari Kementerian. Kalau kesiapan memang harus dilakukan agar destinasi benar-benar siap," katanya.

Dispar DIY, katanya, sudah mengusulkan destinasi yang diujicoba semestinya sudah memiliki sertifikat CHSE dari Kemenperkrif. "Dari puluhan destinasi wisata di DIY hanya 26 destinasi wisata yang mendapatkan sertifikat CHSE. Itupun belum termasuk hotel dan restoran. Saya akan cek lagi 26 destinasi wisata itu mana saja," katanya.

Beredar kabar Ratu Boko diusulkan diganti dengan Tebing Breksi. Alasannya, Ratu Boko yang merupakan bagian dari PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko sudah diwakili Borobudur dan Prambanan untuk uji coba.

VP Marketing and Sales PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Pujo Suwarno, mengatakan belum mengetahui rencana pengantian tersebut. Pengelola Ratu Boko sedang mematangkan rencana uji coba pembukaan destinasi wisata dengan Dispar DIY.

"Sebaiknya menunggu setelah kami dengan berkoordinasi dengan Dispar DIY, nanti setelah *fixed* kami kabari. Kalau kami mana yang terbaik saja," ujarnya.

Dijelaskan Pujo, berdasarkan sosialisasi dari Kemenparekrif Rabu kemarin, uji coba objek wisata di 20 destinasi se-Jawa akan terpantau secara nasional.

"Jadi, dukungan *provider* dan SOP kami mengikuti pedoman dari pemerintah. Untuk Ratu Boko di area seputaran gerbang masuk, loket dan restoan [masalah jaringan Internet] insyaallah aman," katanya.

Diakui, ada yang mengusulkan untuk menggunakan kartu vaksin saja (tanpa aplikasi *Peduli Lindungi*). Hanya saja, kata dia, yang lebih penting seajutnya *update* kondisi pengunjung. "Itu bisa dicek di status aplikasi *Peduli Lindungi* personal, apakah hijau, merah, atau yang lain," katanya.

Alat Pemindai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Taman Budaya selaku pengelola Taman Pintar hanya tinggal menunggu penyiapan sistem pemindai sebagai penapisan bagi wisatawan yang akan berkunjung di masa uji coba pembukaan wisata nanti.

Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya, Retno Yuliani, mengatakan penerapan CHSE pun juga telah diperoleh oleh wahana wisata edukasi itu. "Kami kan ada planetarium di mana proyektor dan alat peraga yang di dalam perlu perawatan, ini kami siapkan sarprasnya agar pas pembukaan siap, begitu juga dengan SDM, artinya dari sisi alat peraga, sarpras, dan SDM kami sudah siap. Namun untuk kode QR *Peduli Lindungi* itu sedang dalam proses dan kami masih menunggu untuk itu," kata Retno, Kamis.

Ia menjelaskan sesuai dengan aturan operasional wisata di masa pandemi, nantinya hanya ada beberapa wahana saja yang dibuka. Wahana wisata air, *playgroup* atau yang lain masih ditutup terlebih dahulu. Pembatasan kepada pengunjung juga akan diberlakukan. Misalnya di masa normal, Taman Pintar bisa menampung sebanyak 3.000 wisatawan dalam sehari, di masa uji coba nanti kunjungan dibatasi hanya setengahnya yakni di kisaran 1.000-1.500 per hari.

Simulasi dari awal pintu masuk juga telah dipersiapkan. Wisatawan yang berkunjung nantinya diarahkan untuk memakai aplikasi *Peduli Lindungi*. (Sugeng Pranyoto)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005